

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar negeri, menjadi fondasi penting bagi terciptanya generasi penerus yang cerdas, berakarakter, dan mampu bersaing di era global. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai strategi dan inovasi terus dikembangkan, salah satunya adalah penerapan manajemen berbasis data (data-driven management) di lingkungan sekolah.

Manajemen berbasis data adalah pendekatan yang menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program pendidikan. Melalui pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data yang sistematis, sekolah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, efektif, dan efisien. Data yang dimaksud dapat berupa data akademik siswa, kehadiran, hasil asesmen, data guru, sarana prasarana, serta data terkait pelaksanaan program-program sekolah lainnya.

Visi Pendidikan Indonesia adalah Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Untuk mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia ini Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan Merdeka Belajar (MB) untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia

ini sudah diluncurkan, bahkan sudah sampai episode ke-19, yaitu Rapor Pendidikan Indonesia

Rapor Pendidikan merupakan sebuah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Rapor Pendidikan memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan Rapor Mutu. Rapor Mutu mengukur delapan indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan data yang bersumber dari Dapodik dan hasil penginputan langsung oleh sekolah melalui aplikasi EDS. Sedangkan, Rapor Pendidikan juga mengukur indikator turunan dari delapan Standar Nasional Pendidikan tanpa melakukan penginputan data apapun. Dengan demikian, dalam proses menghasilkan data pada Rapor Pendidikan tidak ada pengulangan pengisian data kembali yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dan daerah

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya. Rapor pendidikan itu sendiri dalam dasar hukumnya merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada bagian norma Evaluasi Sistem Pendidikan disebutkan bahwa hasil dari evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk Menteri menetapkan profil satuan pendidikan, pendidikan kesetaraan, pendidikan daerah, dan pendidikan nasional (lihat: Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (6)), dan selanjutnya profil pendidikan tersebut menjadi landasan untuk penetapan rapor pendidikan (lihat: Pasal 45 ayat (4) huruf b dan Pasal 46 ayat (7) huruf b).

Melalui mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut, lebih lanjut Kemdikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. Rapor pendidikan disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek tersebut sebagai indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian dan terdiri atas rapor satuan pendidikan, rapor program pendidikan kesetaraan, rapor pendidikan daerah, dan rapor pendidikan nasional.

Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan ini melandasi perlunya Perencanaan Berbasis Data yang menjadi salah satu pokok pembahasan pada tata kelola evaluasi dan perencanaan sistem pendidikan baik di level Pemerintah Daerah maupun di satuan pendidikan.

Disamping regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sebagai pemegang mandat penyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) urusan Pendidikan, satuan pendidikan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak mengikuti regulasi yang dinaungi oleh Pemerintahan Daerah serta Kementerian Dalam Negeri yang menaungi tata kelola Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan standar minimal untuk pemenuhan urusan pemerintahan salah satunya Pendidikan sebagaimana merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertindak aktif untuk menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Berkaitan dengan adanya SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana disebutkan pada Lampiran Permendagri tersebut bahwa pemenuhan kriteria minimal urusan Pendidikan pada SPM berlandaskan dari data yang tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek (Lihat: Lampiran halaman 76-87), sehingga dari penormaan tersebut terlihat kebutuhan penggunaan rapor yang menjadi mandat dan menjadi landasan setiap pemangku kepentingan Pendidikan baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan Pendidikan.

Dari data unduhan di rapor pendidikan, SDN Wangkalwetan Kejayan mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan BOS Kinerja yang sudah diberikan untuk SDN Wangkalwetan. Dari peningkatan tersebut tentunya harus ada strategi dalam mempertahankannya atau bahkan lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan strategi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II di tahun 2024 nanti adalah dengan Perencanaan Berbasis Data.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan manajemen berbasis data di sekolah dasar, khususnya di daerah, masih menghadapi sejumlah tantangan. Di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, misalnya, upaya peningkatan kualitas pendidikan seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung pemanfaatan data secara optimal. Selain itu, pemahaman dan keterampilan kepala sekolah, guru, dan tenaga

kependidikan dalam mengelola serta menganalisis data juga masih perlu ditingkatkan.

Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan di sekolah seringkali masih bersifat konvensional, mengandalkan intuisi atau pengalaman semata, tanpa didukung oleh data yang valid dan akurat. Akibatnya, program-program peningkatan mutu pendidikan yang dijalankan belum sepenuhnya tepat sasaran dan berkelanjutan. Padahal, dengan manajemen berbasis data, sekolah dapat lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merancang solusi yang relevan, serta memantau perkembangan dan hasil yang dicapai secara objektif.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah, telah mendorong sekolah-sekolah untuk lebih adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dan data. Namun, penerapan di tingkat sekolah dasar masih sangat bervariasi, tergantung pada kesiapan dan komitmen masing-masing sekolah, termasuk di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan manajemen berbasis data di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di kedua sekolah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata sekaligus rekomendasi strategis bagi sekolah-sekolah dasar lainnya dalam mengaplikasikan manajemen berbasis data guna mencapai pendidikan yang berkualitas.

.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Manajemen Berbasis Data dalam pengelolaan pendidikan di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Manajemen Berbasis Data di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II?
3. Bagaimana dampak penerapan Manajemen Berbasis Data terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada aspek kinerja guru, hasil belajar siswa, dan akuntabilitas pengelolaan sekolah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses penerapan manajemen berbasis data dan pengelolaannya di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen berbasis data di kedua sekolah.
3. Mengetahui dan mendata dampak penerapan manajemen berbasis data terhadap kualitas pendidikan di kedua sekolah.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian tentang Penerapan Manajemen Berbasis Data dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SDN Wangkalwetan dan SDN Ketangirejo II Kec. Kejayan di Kabupaten Pasuruan, dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan :

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan di bidang Manajemen Berbasis Data dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.
2. Menambah referensi akademik mengenai hubungan antara manajemen Berbasis Data dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan.
3. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji model Berbasis Data dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.
4. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan, khususnya mengenai penerapan manajemen berbasis data di sekolah dasar.

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi sekolah:
 - a) Mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;
 - b) Bisa lebih mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan

- c) melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya

2. Bagi guru dan tenaga kependidikan:

Meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan.

3. Bagi pemerintah daerah:

Sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya

1.6 Definisi Istilah/Definisi Operasional

1. Manajemen Berbasis Data adalah Proses pengelolaan sekolah yang menggunakan data sebagai dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.
1. Kualitas Pendidikan adalah tingkat pencapaian standar mutu pendidikan yang meliputi aspek input, proses, output, dan outcome pendidikan di sekolah dasar.